



Kartu Mahasiswa

Bisa untuk Urus DPT

YOGYA (KR) - Guna mengoptimalkan keikutsertaan masyarakat untuk memilih dalam Pilpres, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperbolehkan mahasiswa menggunakan kartu tanda mahasiswa untuk mengurus Daftar Pemilih Tetap (DPT). Selain kartu tanda mahasiswa, untuk menunjukkan identitas, juga dapat menggunakan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan paspor.

Dibukanya kemudahan menjadi pemilih bagi mahasiswa luar daerah diungkapkan anggota KPU DIY, M Najib kepada wartawan, Rabu (6/5) di KPU DIY. "KPU Pusat mengatakan agar mahasiswa diberi kemudahan dapat memilih dengan menyertakan kartu tanda mahasiswa untuk mengurus DPT," kata Najib.

Tak dapat dipungkiri, tambah Najib, di Yogyakarta banyak sekali mahasiswa dari luar daerah. Mereka selama ini kesulitan melakukan pendataan pemilih.

Dalam undang-undang Pilpres, tak menyebut KTP sebagai syarat seseorang untuk didaftar. Sebaliknya UU no 10

tahun 2008, menyebutkan KTP sebagai identitas pemilih. Kebingungan kian bertambah karena justru dalam peraturan KPU no 14 tahun 2009 menyebutkan identitas pemilih adalah KTP/identitas lain. Ini menjadi penghambat, karena dengan penyebutan identitas lain, maka identitas lain (KTM, NIK) terpenuhi.

Menurut Najib, KPU DIY sendiri memahami identitas lain harus setara dengan KTP. Menurut Najib, SIM, paspor, dan Kartu Keluarga masuk dalam kartu identitas yang setara dengan KTP.

"Karena SIM dan paspor dasarnya dari data KTP. Tapi kalau NIK dan KTM tidak se-

tara, karena datanya bukan dari data kependudukan," kata Najib.

Sementara KPU Kota Yogyakarta saat ini sedang melakukan monitoring dan supervisi pemutakhiran data pemilih di 45 kelurahan yang ada di Kota Yogyakarta.

Langkah ini diambil untuk mengetahui sejauh mana Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang ada di lapangan melaksanakan tugasnya dengan baik. Supervisi ini akan dilakukan hingga 10 Mei mendatang bertepatan dengan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Kota Yogyakarta.

"Kami hanya ingin memas-

tikan apakah para PPDP betul-betul *door to door* dalam mendata. Kami akan mengecek melalui stikerisasi di rumah-rumah yang telah dikunjungi," ungkap anggota KPU Kota Yogya Sunaji menjawab pertanyaan KR di kantor KPU, Rabu (6/5). Total PPDP se-kota sebanyak jumlah TPS saat Pileg yaitu 957 orang.

Dijelaskan, pengecekan ini juga dilaksanakan dengan melihat formulir untuk pemilih Pilpres yang harus terdapat paraf dari anggota keluarga yang didatangi. Menurut Sunaji, bukti tersebut penting, karena sebagai pertanggungjawaban PPDP terhadap pekerjaannya.

"Jadi jika di kemudian hari ada komplain, kami telah memiliki data yang otentik. Dengan cara ini harapannya kami mempunyai bank data pemilih yang akurat dan valid di lapangan," ujarnya.

Sunaji mengatakan, saat ini pihaknya juga sedang melakukan komunikasi politik dengan Pemkot Yogyakarta, untuk meminta adanya fasilitasi validasi data secara bersama-sama di tingkat RT. "Setelah melalui *screening* PPDP dan PPS, nantinya di masing-masing RT ada pertemuan untuk saling kroscek, sehingga akurasi data bisa terukur," ucapnya.

Dipaparkan, setelah penetapan DPS, tanggal 11-17 Mei dilakukan masa tanggapan dari masyarakat. Di mana DPS ditempelkan di setiap wilayah dan di situlah waktu yang tepat untuk validasi di tingkat RT. Saat ini KPU kota juga telah mendapatkan data updating dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Selanjutnya pada 18-24 Mei dilaksanakan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

(Jon/Ret)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005